

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PERMA Gugatan Sederhana ini. Pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pdg gugatan yang diajukan bukan termasuk kedalam gugatan sederhana karena gugatan tersebut merupakan gugatan mengenai hak atas tanah. Pengadilan Negeri Padang menyelesaikan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA Gugatan Sederhana dengan melakukan *dismissal process* pada tahap awal untuk melihat apakah gugatan yang diajukan tersebut merupakan gugatan sederhana atau tidak. Pada perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2018/PN Pdg penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai dengan PERMA Gugatan Sederhana walaupun pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang juga dapat dikatakan berhasil dilihat dari hasil penelitian diatas bahwa gugatan yang masuk menggunakan gugatan sederhana sampai tahun 2018 berjumlah 71. Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pdg penyelesaiannya pun telah dilakukan sesuai dengan PERMA Gugatan Sederhana.
2. Kendala yang terdapat dalam penyelesaian penerapan PERMA Gugatan Sederhana ini yaitu kurangnya pemahaman pihak mengenai gugatan

yang hanya bisa diajukan menggunakan gugatan sederhana seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Pdg dan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Pdg.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang adalah dengan memberikan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat mengenai PERMA Gugatan Sederhana, mulai dari menjelaskan apa itu gugatan sederhana, syarat-syarat mengajukan gugatan sederhana, serta tata cara pelaksanaan gugatan sederhana sehingga dapat mengurangi terjadinya kendala seperti yang terdapat dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pdg dan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Pdg.

B. Saran

Dilihat dari perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Pdg dan Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Pdg, dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut oleh pengadilan kepada masyarakat dengan menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa ada jalur lain dalam penyelesaian suatu perkara yang dapat dilaksanakan secara sederhana, serta menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya agar masyarakat lebih mengerti mengenai gugatan sederhana dan mengetahui perkara apa saja yang bisa diajukan menggunakan gugatan sederhana